



**Universitas Katolik Parahyangan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Program Studi Administrasi Publik**

*Terakreditasi Unggul  
Sk BAN-PT No. 1844/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/V/2023*

**Mekanisme Koordinasi Antara PPK dan PANSWASCAM Dalam  
Proses Pendataan Dalam Pemilihan Umum 2024 Di Kecamatan  
Batununggal, Kota Bandung**

**Skripsi**

**Oleh**  
Ardhana Rafiyshah Randi  
2017310092

Bandung  
2024



**Universitas Katolik Parahyangan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Program Studi Administrasi Publik**

*Terakreditasi Unggul  
Sk BAN-PT No. 1844/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/V/2023*

**Mekanisme Koordinasi Antara PPK dan PANSWASCAM Dalam  
Proses Pendataan Dalam Pemilihan Umum 2024 Di Kecamatan  
Batununggal, Kota Bandung**

**Skripsi**

**Oleh**

Ardhana Rafiyshah Randi  
2017310092

**Dosen**

Dr. Ulber Silalahi, MA

Bandung  
2024

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Jurusan Administrasi Publik  
Program Studi Administrasi Publik Program Sarjana



**Tanda Pengesahan Skripsi**

Nama : Ardhana Rafiyshah Randi  
Nomor Pokok Mahasiswa : 2017310092  
Judul : Mekanisme Koordinasi Antara PPK dan PANSWASCAM  
Dalam Proses Pendataan Dalam Pemilihan Umum 2024 Di  
Kecamatan Batununggal, Kota Bandung

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana  
Pada Jumat, 26 Juli 2024  
Dan dinyatakan **LULUS**

**Tim Penguji**


**Ketua sidang merangkap anggota**

Maria Rosarie Harni Triastuti, S.IP., M.Si.

: 

**Sekretaris**

Dr. Ulber Silalahi, MA

: 

**Anggota**

Hubertus Hasan Ismail, Drs., M.Si.

: 

Mengesahkan,  
Pj. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Orpha Jane

## Surat Pernyataan

Saya bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : Ardhana Rafisyah Randi  
NPM : 2017310092  
PROGRAM STUDI : Ilmu Administrasi Publik  
JUDUL : Mekanisme Koordinasi Antara PPK dan Panwascam Dalam Proses  
Pendataan Dalam Pemilihan umum 2024 Di Kecamatan  
Batununggal, Kota Bandung

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan unuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun penulisan yang berasal dari pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan aturan penulisan ilmiah yang berlaku. Pernyataan ini sya buat dengan penuh tanggungjawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 17 Juli 2024



Ardhana Rafiyshah Randi

## ABSTRAK

Nama : Ardhana Rafiyshah Randi  
NPM : 2017310092  
Judul : Mekanisme Koordinasi Antara PPK dan PANSWASCAM Dalam Proses Pendataan Dalam Pemilihan Umum 2024 Di Kecamatan Batununggal, Kota Bandung

---

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan juga memahami bagaimana mekanisme koordinasi yang terjadi antara PPK dan Panwascam. Teori mekanisme koordinasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori yang dicetus oleh Henry Mintzberg yang terdiri dari 5 dimensi yaitu mekanisme koordinasi yaitu *Mutual Adjustment*, *Direct Supervision*, *Standardization Of Work Proseses*, *Standardization Of Work Outputs*, dan *Standardization Of Worker Skills*.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif dengan menggunakan analisis deskriptif yaitu distribusi frekuensi dan kecenderungan pusat serta analisis Key Drivers Analysis untuk mengetahui berapa persen kontribusi setiap dimensi. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa kuesioner dan wawancara. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 8 orang responden yang terdiri dari 5 orang anggota PPK kecamatan Batununggal Kota Bandung dan 3 orang anggota Panwascam Kecamatan Batununggal Kota Bandung.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan mekanisme koordinasi sudah berjalan dengan baik, didukung dengan hasil dari setiap dimensi, yaitu : (1) Tingkat *Mutual Adjustment* antara PPK dan Panwascam adalah tergolong baik terhadap mekanisme koordinasi, (2) Tingkat *Direct Supervision* antara PPK dan Panwascam tergolong sangat baik terhadap mekanisme koordinasi, (3) Tingkat *Standardization Of Work Proseses* antara PPK dan Panwascam adalah tergolong baik terhadap mekanisme koordinasi, (4) Tingkat *Standardization Of Work Outputs* antara PPK dan Panwascam tergolong sangat baik terhadap mekanisme koordinasi, dan (5) Tingkat *Standardization Of Worker Skills* antara PPK dan Panwascam tergolong baik terhadap mekanisme koordinasi. Kemudian dalam memberikan kontribusi setiap elemen terhadap mekanisme koordinasi menunjukkan bahwa : *Mutual Adjustment* berkontribusi tinggi terhadap mekanisme koordinasi, *Direct Supervision* berkontribusi rendah terhadap mekanisme koordinasi, *Standardization Of Work Proseses* berkontribusi tinggi terhadap mekanisme koordinasi, *Standardization Of Work Outputs* berkontribusi rendah terhadap mekanisme koordinasi dan *Standardization Of Worker Skills* berkontribusi rendah terhadap mekanisme koordinasi.

Kata Kunci : Koordinasi, Mekanisme Koordinasi, Key Driver Analysis, Henry Mintzberg

## ABSTRACT

*Name : Ardhana Rafiyshah Randi  
NPM : 2017310092  
Title : Coordination Mechanism between District Electoral Committee and District Election Watch Committee in 2024 General Election Voter Registration Process in Batununggal District, Bandung City*

---

*The study is titled “Coordination Mechanism between District Electoral Committee and District Election Watch Committee in 2024 General Election Voter Registration Process in Batununggal District”. This research aims to find out and also understand how the coordination mechanism occurs between District Electoral Committee and District Election Watch Committee. The coordination mechanism theory used in this research is a theory coined by Henry Minzberg.*

*The samples that are used for the study are 8 respondent and it consist, 5 members of the district electoral committee and 3 members of the district election watch committee.*

*This study uses quantitative data analysis with descriptive type of research couples with Key Driver Analysis to determine the coordination mechanism between the two institutions and also the influence of each dimension of the coordination mechanism. The data collection technique used were questionnaires and interviews.*

*Based on the result achieved, it's concluded that the coordination mechanism that occurred between the two institutions showed very high result for the coordination carried out in the voter data collection process in the 2024 general election.*

*Keyword : Coordination, coordination mechanism, key driver analysis, Henry Minzberg*

## **KATA PENGANTAR**

Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada hadirat ALLAH SWT karena atas rahmat penulis dapat menyelesaikan rancangan penelitian ini dengan judul “Mekanisme Koordinasi Antara PPK dan PANSWASCAM Dalam Proses Pendataan Pemilihan Umum 2024 Di Kecamatan Batununggal ”, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada jurusan Administrasi Publik Universitas Katolik Parahnyangan.

Penulis menyadari bahwa rancangan penelitian ini tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, serta nasihat dari berbagai pihak selama penyusunan rancangan penelitian ini.

Apresiasi serta terima kasih penulis sampaikan kepada berbagai pihak yang membantu penulis dalam pembuatan rancangan penelitian ini, terutamanya kepada

1. Dr. Orpha Jane sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik
2. Jeremia Gom Gom Parulian Simanjuntak, S.Sos., M.A.P sebagai Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik
3. Dr. Ulber Silalahi, M.A. sebagai Dosen Pembimbing dalam penyusunan Skripsi
4. Seluruh Dosen di lingkungan Prodi Ilmu Administrasi Publik dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Parahnyangan yang telah membagikan ilmunya bagi kami para Mahasiswa.
5. Keluarga Saya : orang tua, Sri Suryatiwi dan Muhammad Yasin serta abang saya, Fikri Rabbani, dan kaka saya, Shintia Ramadhan Putri, yang selalu memberikan dukungan baik secara materi dan materi.

6. Sahabat-sahabat saya selama di kampus, radityo, lutfi, diva, dan tomy yang selalu memberi saya dukungan dan membantu saya dalam pengerjaan skripsi selama di bandung.
7. Tante saya Ety Suryati beserta suami Deni Valentino Manik dan sepupu saya Rizky Abdilah Mangulahi Manik yang selalu memberikan dukungan dalam bentuk apapun.
8. Keluarga besar nenek saya Hj. Haryani Syamsu yang selalu memberikan dukungan kepada saya untuk selalu semangat.
9. Dosen jurusan Administrasi Publik, Pak Deny, Bu Gina, Mas Maul, Mas Jerry, Bu Ani, Pak Hubertus serta lain-lain yang saya tidak bisa sebutkan satu per satu.
10. Anggota PPK dan Panwascam Kecamatan Batununggal, Kota Bandung yang senantiasa membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.



## DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	iii
ABSTRACT.....	iii
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Rancangan Penelitian .....	9
1.5.1 Pengertian Rancangan Penelitian .....	9
1.5.2 Jenis Rancangan Penelitian .....	10
1. Rancangan Penelitian menurut Tujuan Penelitian.....	10
2. Rancangan Penelitian menurut Pendekatan Penelitian.....	10
3. Rancangan Penelitian menurut Strategi Penelitian.....	11
4. Rancangan Penelitian menurut Waktu Penelitian.....	11
1.5.3 Jenis Rancangan Penelitian Yang Digunakan .....	11
BAB II KERANGKA TEORITIK.....	14
2.1 Pengertian Koordinasi .....	14
2.2 Mekanisme Koordinasi.....	16
2.2.1 Mutual adjustment.....	18
2.2.2 Direct Supervision.....	20
2.3.3 Standarization Of Work Prosecces.....	21
2.3.4 Standardization of work output.....	22
2.3.5 Standardization of skills.....	23
2.3 Penelitian Terdahulu.....	24
2.4 Model Penelitian.....	26
BAB III METODE PENELITIAN .....	28
3.1 Pengumpulan Data.....	28
3.1.1 Populasi dan Sampel .....	28
3.1.2 Operasionalisasi Variabel .....	29
3.1.3 Skala Pengukuran dan Teknik Penskalaan.....	31

3.1.4 Uji Validitas dan Reliabilitas .....	33
3.1.5 Pengumpulan Data.....	38
3.2 Analisis Data .....	39
3.3. Analisis Data menggunakan Key Driver Analysis .....	43
<b>BAB IV HASIL DAN INTERPRETASI DATA.....</b>	<b>44</b>
4.1 Profil Responden .....	45
4.2 Analisis Deskriptif.....	47
4.2.1 Mutual Adjustment .....	48
4.2.2 Direct Supervision .....	50
4.2.3 Standardization Of Work Proseses.....	51
4.2.4 Standardization Of Work Outputs .....	53
4.2.5 Standardization Of Worker Skills.....	54
4.3 Key Driver Analysis .....	58
<b>BAB V PEMBAHASAN.....</b>	<b>62</b>
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>72</b>
5.1 Kesimpulan.....	72
5.2 Saran .....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>74</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>76</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1	Operasional Variabel .....	29
tabel 3. 2	Skor penilaian Skala Likert .....	32
tabel 3. 3	Rekapitulasi Hasil Uji Validitas .....	34
tabel 3. 4	Uji reliabilitas.....	37
tabel 4. 1	Jabatan Responden .....	45
tabel 4. 2	Jenis Kelamin Responden .....	46
tabel 4. 3	Usia Responden.....	46
tabel 4. 4	Kecenderungan Pusat.....	47
tabel 4. 5	Kategorisasi Dimensi Mutual Adjument.....	48
tabel 4. 6	Kategorisasi Dimensi Direct Supervision .....	50
tabel 4. 7	Kategorisasi Dimensi Standardization Of Work Proseses .....	51
tabel 4. 8	Kategorisasi Dimensi Standardization Of Work Outputs .....	53
tabel 4. 9	Kategorisasi Dimensi Standardization Of Worker Skills .....	55
tabel 4. 10	Indeks Dimensi-Dimensi Mekanisme Koordinator.....	56

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pasal I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Makna dari "kedaulatan berada di tangan rakyat" yaitu bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Perwujudan kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui Pemilu sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih pemimpin melalui Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih secara langsung serta memilih wakilnya yang akan menjalankan fungsi melakukan pengawasan, menyalurkan aspirasi politik rakyat, membuat undang-undang sebagai landasan bagi semua pihak di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam pelaksanaannya, proses pemilu dijalankan oleh komisi pemilihan umum selaku Lembaga penyelenggara pemilu dan ditingkat kecataman ataupun kelurahan KPU memiliki kewenangan untuk mengangkat badan adhoc untuk membantu tugasnya dalam melaksanakan pemilu. Dalam PKPU No.3 Tahun 2022, ada berbagai tahapan dan jadwal penyelenggaran pemilu dimana salah satu yang paling penting adalah proses pemuktahiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih yang dilaksanakan oleh KPU dari tingkat pusat hingga ke tingkat kota dimana proses dilapangan dijalankan oleh badan adhoc yaitu panitia pemilih

kecamatan (PPK), panitia pemungutan suara (PPS) untuk ditingkat kelurahan, dan panitia pemutakhiran data (Pantarlih). Mekanisme proses pendataan dilaksanakan dengan memverifikasi data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) yang bersumber dari data kependudukan dinas kependudukan dan catatan sipil (Disdukcapil) yang diserahkan kepada KPU lalu diserahkan kepada badan adhoc. Perekrutan badan adhoc dilaksanakan dengan merekrut tokoh-tokoh masyarakat yang tentunya memerlukan partisipasi masyarakat. Dalam proses pendataan PPS hingga KPU pusat melaksanakan sidang pleno untuk menjabarkan data-data yang mereka peroleh kepada masyarakat dan masyarakat dapat memberi tanggapan mengenai data yang telah dihasilkan oleh penyelenggara pemilu. Terdapat tiga kali sidang pleno, yang pertama adalah penyampaian hasil cokolit yang telah disusun menjadi daftar pemilih hasil pemutakhiran atau DPHP yang dilanjutkan dengan perbaikan daftar pemilih yang akan disusun lagi menjadi daftar pemilih sementara hasil perbaikan atau DPSHP dan akan sekali lagi menerima tanggapan dari masyarakat serta akan disusun ulang menjadi daftar pemilih tetap atau DPT yang bersifat final.

Dalam pelaksanaannya diperlukan pengawasan dalam proses pemilu mulai proses pendataan hingga pemungutan dan penghitungan suara, maka untuk melakukan pengawasan kinerja penyelenggara pemilu dibentuk sebuah lembaga untuk melakukan fungsi pengawasan tersebut, yaitu Badan Pengawas Pemilu atau BAWASLU. Bawaslu sendiri memiliki badan adhoc untuk bertugas dilapangan mulai dari tingkat kecamatan hingga kelurahan. Di wilayah kecamatan, lembaga

tersebut bernama Panwascam atau panitia pengawas kecamatan dan ditingkat kelurahan bernama pengawas kelurahan/desa atau disingkat PKD.

Antara panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan panitia pengawas kecamatan (PANWASCAM) harus berkoordinasi dalam proses pendataan pemilih di kecamatan batununggal dalam pemilihan umum 2024 dikarenakan PPK sebagai penyelenggara pemilu sebagai pihak yang berhubungan dengan peserta pemilu dan pemilih, seringkali rawan menciptakan perselisihan ataupun kesalahpahaman, maka peran PANWASCAM seringkali diperlukan untuk memberikan rekomendasi atau catatan pengawasan kepada PPK sebagai pengawas pemilu atau dengan kata lain bahwa PPK dan PANWASCAM adalah stakeholder kepemiluan dalam tingkat kecamatan. Koordinasi merupakan salah satu aspek yang penting, dimana adanya kerjasama antar actor penting didalamnya untuk menggapai dan mewujudkan satu tujuan bersama. Koordinasi atau integrasi yang dimaksudkan agar tugas-tugas dan sumber-sumber digunakan secara efektif dan secara efisien.<sup>1</sup> Sehingga organisasi dapat menjadi sarana bagi kerja sama yang efektif dan efisien daripada orang bekerja sendirian.<sup>2</sup>

Dalam proses penyelenggaraan pemilu tentunya diperlukan sebuah koordinasi antara KPU dan BAWASLU hingga badan adhoc masing-masing lembaga di lapangan. Seringkali terjadi berbagai dinamika dilapangan yang membuat posisi kedua lembaga tersebut saling bersikutan namun masih dalam batas wajar. Maka penting untuk petugas penyelenggara pemilu dan pengawas pemilu

---

<sup>1</sup> Ulber, Silalahi, *Asas-Asas Manajemen* (Bandung : PT. Refika Aditama,2011), 217.

<sup>2</sup> Ulber, Silalahi, *Op.Cit.*, 2011, 404

untuk berkoordinasi dalam proses pendataan yang berkaitan secara kuat dengan hak pilih yang dimiliki oleh masyarakat yang telah dijamin oleh konstitusi. Penjelasan mengenai koordinasi tersebut akan menuntun kepada ruang lingkup yang lebih kecil dari koordinasi yaitu mengenai mekanisme koordinasi. Mekanisme koordinasi ini sendiri merupakan sub-sistem dari system social yang mengkoordinasikan aktifitas dari setiap per-orang atau organisasi didalamnya.

Penelitian ini dilakukan di Kota Bandung, Kecamatan Batununggal. Dimana kecamatan Batununggal adalah salah satu kecamatan dengan jumlah pemilih paling banyak di kota bandung dengan jumlah pemilih awal dalam DP4 sebesar 91.740 pemilih dan 371 TPS dan 8 Kelurahan. Setelah dilaksanakan sidang pleno DPHP mengeluarkan data sebesar 91.504 pemilih dan 376 TPS ditambah adanya lokasi khusus yaitu rutan kebon waru dan dalam sidang pleno DPSHP mengeluarkan data sebesar 91.119 pemilih dan 374 TPS.

Untuk mengetahui mekanisme koordinasi yang baik maka akan digunakan 5 dimensi dasar yang dipenuhi dalam proses mekanisme koordinasi menurut *Henry minzberg* yaitu *mutual adjustment, direct supervision, standardization of work process, stardardization of output, stardardization of skills*.<sup>3</sup> *Mutual adjustment* adalah dimana para pekerja saling berkonsultasi secara informal mengenai apa yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan bagaimana caranya. Tanggung jawab untuk koordinasi dan pengendalian terletak pada mereka yang melakukan pekerjaan tersebut. *Direct Supervision* adalah seorang supervision yang ditugaskan untuk

---

<sup>3</sup> H.Mintzberg, *Tracking Strategies: Toward a General Theory of Strategy Formation* (New York, NY : Oxford University Press, 2009) dikutip oleh F.C. Lunenberg, *Organizational Struture: Mintzberg's Framework' International Journal of Scholarl*, 14 No 1 (2012) : 2

mengambil tanggung jawab sebuah kelompok pekerja dan sebuah hirarki manajerial diciptakan untuk mengintegrasikan usaha-usaha kelompok kerja. Supervision akan berfokus pada masalah intruksi pribadi dan memantau kinerja individu. *Standardization of work process* adalah kerja di program sebelum eksekusinya dengan mengembangkan peraturan-peraturan dan standar prosedur operasional menspesifikasikan bagaimana semua mengerjakan tugas yang diperintahkan. Koordinasi dalam dimensi ini dibangun ke dalam bagaimana proses kerja dan control yang dibangun dapat dicapai dengan secara ketat beriringan dengan membatasi kebijaksanaan masing-masing pekerja. *Standardization of work output* adalah program jangka panjang dengan cara menyediakan setiap kelompok kerja dengan spesifikasi produk atau tujuan kinerja dan memperbolehkan mereka mempertimbangkan cara mereka untuk mencapainya. Control dilakukan dengan cara mengumpulkan data keluaran, dimana hal ini memerlukan tindakan korektif dan memberi penghargaan serta memberi sanksi kepada pekerja berdasarkan hasil yang dicapai. *Standardization of skills* berarti pekerja yang dipekerjakan adalah mereka yang memiliki pengetahuan dan keahlian yang diperlukan untuk membuat keputusan-keputusan yang tepat.

Selain untuk mengukur mekanisme koordinasi yang baik dengan menggunakan 5 dimensi dasar dari Henry Mintzberg, penelitian ini juga mengukur tingkat kontribusi dari masing-masing dimensi terhadap mekanisme koordinasi dengan menggunakan teori dari MORI. Pada tahap ini nantinya akan diukur apakah setiap elemen atau setiap dimensi berkontribusi yang sama terhadap mekanisme koordinasi atau ada elemen yang berkontribusi dengan persentase yang lebih besar



daripada elemennya lainnya maupun elemen yang berkontribusi kecil terhadap mekanisme koordinasi.

Dari studi pendahuluan dapat diidentifikasi mekanisme koordinasi antara PPK dan Panwascam. Terkait dengan elemen *standardization of work process* dari hasil wawancara dengan A selaku Kordiv Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Panwascam Batununggal:

“Kami bekerja sesuai adanya laporan daripada masyarakat, apabila terjadi dugaan pelanggaran yang dilakukan, maka kami akan mendalami laporan tersebut dan memanggil pihak terkait, apakah itu penyelenggara (PPK/KPU) ataupun para peserta, yaitu partai-partai. Adapun perbedaan pendapat antara dua lembaga adalah biasa dan wajar saja, selama tidak mengganggu kerja masing-masing lembaga”<sup>4</sup>

Adapun salah satu dari dimensi mekanisme koordinasi yaitu *standardization of work output* yang dipenuhi menurut hasil dari wawancara dengan I selaku bagian dari Kordiv Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Panwascam Batununggal

“Tentu kerja kami sesuai aturan sesuai pada aturan, aturan yang kami pakai adalah peraturan bawaslu (PERBAWASLU) tentang pengawasan pemutakhiran data pemilih, juga tugas pengawasan kami, yaitu mengawasi tahapan pemilu yang diselenggarakan oleh pihak penyelenggara yaitu PPKs, PPS, dan Pantarlih yang berpedoman pada peraturan KPU (PKPU) tentang petunjuk teknis pemutakhiran data pemilih pada pemilu 2024 ini, maka kami mempedomani dua produk hukum dari dua lembaga, bawaslu dan KPU, sebagai aturan yang kami pegang. Dalam tahapan pelaksanaan pemilu 2024, kami berpedoman pada PKPU no.27 Tahun 2023 tentang pedoman teknis penyusunan data pemilih dalam negeri pada penyelenggaraan pemilihan umum, semua metode sampai timeframe kami berpedoman dari situ”<sup>5</sup>

Selanjutnya terdapat salah satu dimensi mekanisme koordinasi dimana Adanya dimensi *Mutual Adjustment* yang dilakukan oleh PPK seperti hasil wawancara dengan R selaku Kepala Divisi Data dan Informasi PPK Batununggal

---

<sup>4</sup> Hasil wawancara dengan A pada tanggal 1 Agustus 2023

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan A pada tanggal 12 Juni 2024

“Dalam setiap rapat pleno mengenai penetapan Data Pemilih, baik DPS, DPSHP, maupun DPSHPA, kami selalu mengundang rekan-rekan Panwascam dan meminta tanggapan masukan, sesuai dengan Peraturan KPU tentang Penyusunan Data Pemilih. Begitupun diluar sidang pleno kami selalu berkomunikasi, apabila ada informasi-informasi penting perihal data pemilih, apakah itu tidak terdata oleh Pantarlih atau adanya pemilih yang meninggal dunia sejak lama tapi tetap terdata”.<sup>6</sup>

Berdasarkan dari hasil wawancara sementara yang peneliti lakukan ditemukan bahwa ada 3 aspek yang dari 5 dimensi dasar menurut *Henry Mintzberg* yang dipenuhi dalam proses mekanisme koordinasi yang dilakukan oleh Panitia Pemilih kecamatan dan Panitia Pengawas Kecamatan. Yang pertama adalah aspek *mutual adjustment* atau adanya konsultasi yang dilakukan secara informal, hal ini dijelaskan oleh narasumber bahwa mereka selalu melakukan koordinasi dengan cara berkonsultasi secara informal perihal tentang data pemilih dan pendataan pemilih. Yang kedua adanya aspek *Standardization of work process*, hal ini dijabarkan dengan penjelasan bahwa adanya hukuman apabila prosedur tidak dilakukan dengan semestinya. Dan yang terakhir adanya dimensi *standardization of work output* dimana adanya mereka bekerja dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dari awal.

Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan sejauh mana ke lima elemen dalam mekanisme koordinasi antara PPK dan Panwascam dalam proses pendataan pemilih dilakukan penelitian dengan judul “Mekanisme Koordinasi antara PPK dan PANWASCAM Dalam Proses Pendataan Pemilih Dalam Pemilihan Umum 2024 di Kecamatan Batununggal”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

---

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan R pada tanggal 1 Agustus 2023

Peneliti melihat bahwa mekanisme koordinasi antar lembaga baik itu internal maupun eksternal dapat menggambarkan bagaimana proses mencapai tujuan yang akan dicapai dari sebuah organisasi atau lembaga dapat berjalan dengan baik. Mekanisme koordinasi merupakan salah satu aspek yang penting, dimana adanya kerjasama antar aktor penting didalamnya untuk menggapai dan mewujudkan satu tujuan bersama. Kecamatan Batununggal menjadi perhatian peneliti karena salah satu kecamatan dengan pemilih paling banyak di Kota Bandung yang berjumlah 91.504 pemilih. Oleh sebab itu pelaksanaan mekanisme koordinasi antara PPK dan Panwascam di Kecamatan Batununggal harus berjalan dengan baik karena hal ini menyangkut proses pendataan pemilu dengan jumlah pemilih yang banyak.

Berdasarkan rumusan masalah di atas, pertanyaan penelitian adalah seberapa baik mekanisme koordinasi antara PPK dan Panwascam dalam proses pendataan pemilih. Adapun pertanyaan spesifik terkait dengan dimensi-dimensi mekanisme koordinasi adalah sebagai berikut :

1. Seberapa baik pelaksanaan mekanisme koordinasi yang dilakukan oleh PPK dan PANWASCAM dalam proses pendataan pemilih untuk pemilihan umum 2024 di Kecamatan Batununggal?
2. Seberapa besar kontribusi tiap elemen terhadap tingkat koordinasi antara PPK dan Panwascam dalam proses pendataan pemilih?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami seberapa mekanisme koordinasi yang dilakukan oleh PPK dan PANWASCAM dalam proses pendataan pemilih untuk pemilihan umum 2024 di Kecamatan Batununggal sudah berjalan baik atau tidak.
2. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi dari setiap elemen yang ada terhadap tingkat koordinasi antara PPK dan Panwascam dalam proses pendataan pemilih.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini dibagi dua yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis yakni memberikan kontribusi serta dapat memberikan manfaat referensi terutama yang berkaitan dengan koordinasi dan mekanisme koordinasi. Manfaat praktis yakni penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan untuk mengetahui bagaimana mekanisme koordinasi yang dilakukan oleh badan PPK dan PANWASCAM di Kecamatan Batununggal.

#### **1.5 Rancangan Penelitian**

##### **1.5.1 Pengertian Rancangan Penelitian**

Setelah rumusan masalah telah ditemukan maka tahap selanjutnya yang akan dilakukan oleh peneliti adalah membuat rancangan penelitian. Dalam membuat penelitian dibutuhkan panduan yang tepat agar penelitian dapat tersusun dengan baik dan juga akademis dan tetap sesuai pada jalurnya. Rancangan penelitian dibuat agar memungkinkan peneliti mampu menjawab pertanyaan

penelitian dengan valid, objektif, tepat, dan hemat.<sup>7</sup> Di sini terangkum paparan mengenai hal-hal yang dilakukan oleh peneliti mulai dari pemilihan masalah, pengembangan teori dan perumusan hipotesis dan implikasi operasional hipotesis tersebut, sampai pada analisis akhir terhadap data.<sup>8</sup> Rancangan penelitian adalah rencana dan struktur penyelidikan yang disusun sedemikian rupa sehingga peneliti akan dapat memperoleh jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan penelitiannya.<sup>9</sup>

### **1.5.2 Jenis Rancangan Penelitian**

#### **1. Rancangan Penelitian menurut Tujuan Penelitian**

Penelitian deskriptif menyajikan satu gambar yang rinci tentang situasi khusus, setting social, atau hubungan<sup>10</sup>. Penelitian deskriptif bermaksud menjawab pertanyaan “*what*”. Tipe rancangan focus pada menggambarkan “*what is*”. Rancangan penelitian deskriptif juga bertujuan menggambarkan secara cermat karakteristik dari suatu gejala atau masalah yang diteliti, dan berfokus pada pertanyaan dasar “bagaimana” dengan berusaha mendapatkan dan menyampaikan fakta-fakta dengan jelas, teliti, dan lengkap<sup>11</sup>.

#### **2. Rancangan Penelitian menurut Pendekatan Penelitian**

Penelitian kuantitatif adalah penyelidikan tentang masalah sosial berdasarkan pada pengujian sebuah teori yang terdiri dari variabel-variabel, diukur dengan

---

<sup>7</sup> Silalahi, Ulber. *Metode Penelitian Sosial Kuantitatif*. Bandung: Refika Aditama, 2017. 97.

<sup>8</sup> *Ibid*, 98.

<sup>9</sup> *Ibid*, 98.

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm 115

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm 116

angka, dan dianalisis dengan prosedur statistik untuk menentukan apakah generalisasi prediktif teori tersebut benar. Umumnya penelitian kuantitatif menggunakan analisis statistik atas data kuantitatif maupun data kualitatif yang telah dikuantifikasi.<sup>12</sup>

### **3. Rancangan Penelitian menurut Strategi Penelitian**

Survei merupakan usaha untuk mengumpulkan data dari anggota populasi untuk menentukan status terakhir dari populasi mengenai satu atau lebih fenomena<sup>13</sup>.

### **4. Rancangan Penelitian menurut Waktu Penelitian**

. Lintas-seksional menunjukkan kebutuhan pada fakta pada momen tunggal dalam waktu, informasi pada suatu peristiwa dalam satu waktu, mendapatkan informasi dari satu kelompok tunggal dari responden pada satu kejadian tunggal dalam waktu tanpa berusaha mennindaklanjuti lintas waktu.

#### **1.5.3 Jenis Rancangan Penelitian Yang Digunakan**

1. Rancangan Penelitian menurut Tujuan Penelitian. Berdasarkan Tujuan Penelitiannya, peneliti menggunakan tipe rancangan penelitian deskripsi. Artinya penelitian deskriptif kuantitatif digunakan jika sudah memiliki pengetahuan yang cukup banyak tentang masalah. Artinya, masalah telah dapat dijelaskan secara teoritis.

2. Rancangan Penelitian menurut Pendekatan Penelitian. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan Kuantitatif dipilih oleh peneliti,

---

<sup>12</sup> Ibid, hlm 100-101

<sup>13</sup> Ibid, hlm 130

karena peneliti tidak memiliki posisi apapun pada subjek penelitian yang terlibat, dimana peneliti hanya mengukur fakta-fakta objektif dan berfokus kepada variabel.

**3. Rancangan Penelitian menurut Strategi Penelitian.** Strategi penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah survey. Strategi penelitian survey ini dipilih untuk menjadi patokan untuk mengetahui bagaimana mekanisme koordinasi yang terjadi di dalam badan PPK dan Panwascam dalam proses pendataan pemilih untuk pemilihan umum 2024 di Kecamatan Batununggal.

**4. Rancangan Penelitian menurut Waktu Penelitian.** Peneliti akan menggunakan dimensi waktu tipe lintas-seksional. Lintas-seksional menjadi pilihan untuk penelitian ini karena peneliti ingin mengetahui fakta dan informasi pada satu waktu saja untuk mengetahui mekanisme koordinasi yang terjadi di dalam badan PPK dan Panwascam dalam proses pendataan pemilih untuk pemilihan umum 2024 di Kecamatan Batununggal.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Penelitian ini disusun dalam enam bab untuk memberikan gambaran penelitian sebagai berikut:

### **BAB I: Pendahuluan**

Mencakup informasi latar belakang yang menguraikan pentingnya kinerja pekerja. penjelasan mengenai rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian berdasarkan wawasan teoritis dan praktis yang ditemukan. diakhiri dengan pemeriksaan metodis terhadap ide-ide utama setiap bab.

### **BAB II: Kerangka Teoritik**

Memuat pembahasan gagasan teoritis yang diterapkan pada permasalahan penelitian, diawali dengan teori dan gagasan yang berkaitan dengan kinerja pegawai yang menjadi landasan temuan penelitian.

### **BAB III: Metodologi Penelitian**

Berisi penjelasan rinci mengenai instrumen penelitian, populasi dan sampel, pengukuran, rencana penelitian, operasional variabel, skala pengukuran, validitas dan reliabilitas instrumen pengumpulan data serial, serta teknik pengumpulan data yang dianggap mampu menjelaskan fenomena yang diteliti untuk keperluan ini. Data yang diperoleh diinterpretasikan menggunakan analisis data.

### **BAB IV: Hasil dan Interpretasi**

Berisi tentang pembahasan terkait dengan hasil penelitian dan interpretasi dari hasil

### **BAB V: Pembahasan**

Berisi tentang analisis dari hasil temuan penelitian yang sudah dijelaskan pada bab 4. Pembahasan lebih fokus terhadap 5 dimensi kinerja yaitu kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, efektivitas dan kemandirian dan kontribusi setiap dimensi terhadap kinerja.

### **BAB VI: Kesimpulan dan saran**

Berisi kesimpulan dan saran dari peneliti terhadap masalah yang ada di dalam penelitian ini.